

**KEDOKTERAN FORENSIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK:
MENYIKAPI KASUS KEMATIAN AKIBAT KEKERASAN*****FORENSIC MEDICINE AND PUBLIC POLICY: RESPONDING TO CASES
OF DEATH DUE TO VIOLENCE*****Andreras Jengkui Nofrianto Liefolid¹, Hudi Yusuf²**

Universitas Bung Karno

Email: jengkuiliefolid@gmail.com**Article Info****Article history :**

Received : 09-08-2025

Revised : 10-08-2025

Accepted : 12-08-2025

Published : 16-08-2025

Abstract

Forensic medicine plays a crucial role in investigating violent deaths, providing scientific evidence that can support legal proceedings. This study aims to explore the relationship between forensic medicine practice and public policy in addressing violent deaths. The methods used include qualitative analysis of case data and interviews with forensic practitioners and policymakers. The results indicate that better integration between forensic medicine and public policy can improve the effectiveness of violent death management and provide better protection for victims. The study's conclusions emphasize the need for closer collaboration between various stakeholders to develop responsive, evidence-based policies.

Keywords: Forensic Medicine, Public Policy, Death Cases**Abstrak**

Kedokteran forensik memainkan peran penting dalam menyelidiki kasus kematian akibat kekerasan, memberikan bukti ilmiah yang dapat mendukung proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara praktik kedokteran forensik dan kebijakan publik dalam menangani kasus kematian yang disebabkan oleh kekerasan. Metode yang digunakan meliputi analisis kualitatif dari data kasus dan wawancara dengan praktisi forensik serta pembuat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi yang lebih baik antara kedokteran forensik dan kebijakan publik dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan kebijakan yang responsif dan berbasis bukti.

Kata Kunci: Kedokteran Forensik, Kebijakan Publik, Kasus Kematian**PENDAHULUAN**

Kedokteran forensik merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip medis dengan aspek hukum, sehingga memainkan peran yang sangat penting dalam penyelidikan kasus-kasus kematian yang mencurigakan. Dalam konteks kekerasan, kedokteran forensik tidak hanya berfungsi untuk menentukan penyebab kematian, tetapi juga untuk memberikan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam proses peradilan. Kematian akibat kekerasan seringkali melibatkan sejumlah faktor yang kompleks, seperti motivasi pelaku, kondisi sosial, dan faktor psikologis, yang memerlukan pemahaman mendalam serta pendekatan multidisipliner dalam investigasinya.

Secara global, kasus kematian akibat kekerasan terus meningkat, sehingga menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat. Data dari berbagai organisasi kesehatan dan lembaga penegak hukum menunjukkan bahwa kekerasan, baik dalam bentuk pembunuhan,



kekerasan domestik, maupun kejahatan seksual, sering kali tidak ditangani dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi antara praktik kedokteran forensik dan kebijakan publik yang ada. Ketidakselarasan ini dapat mengakibatkan proses hukum yang tidak adil, perlindungan yang kurang memadai bagi korban, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika kedokteran forensik dijadikan bagian integral dari kebijakan publik, efektivitas investigasi kasus kekerasan meningkat. Misalnya, kolaborasi antara dokter forensik, penegak hukum, dan pembuat kebijakan dapat menghasilkan sistem yang lebih responsif dalam menangani kasus-kasus ini. Dengan memanfaatkan data dan analisis yang dihasilkan dari kedokteran forensik, kebijakan yang diambil dapat lebih berbasis bukti, sehingga lebih efektif dalam mengurangi angka kekerasan dan meningkatkan rasa aman masyarakat.

Di Indonesia, tantangan ini semakin mendesak. Meskipun ada sejumlah inisiatif untuk mengintegrasikan kedokteran forensik dalam sistem peradilan, masih ada banyak kendala yang harus diatasi. Misalnya, kurangnya sumber daya, pelatihan yang memadai bagi praktisi, serta sistem hukum yang kadang-kadang belum sepenuhnya mendukung penggunaan bukti ilmiah dalam proses peradilan. Hal ini menyebabkan banyak kasus kematian akibat kekerasan tidak terungkap secara optimal, sehingga pelaku kekerasan sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara praktik kedokteran forensik dan kebijakan publik dalam menangani kasus kematian akibat kekerasan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menganalisis data kasus dan melibatkan wawancara dengan praktisi forensik serta pembuat kebijakan. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dalam konteks kedokteran forensik, tetapi juga berupaya meningkatkan perlindungan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara praktik kedokteran forensik dan kebijakan publik dalam menangani kasus kematian akibat kekerasan. Desain penelitian berupa studi kasus dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap beberapa kasus kematian yang terjadi di wilayah tertentu, sehingga dapat memahami konteks sosial, politik, dan hukum yang mempengaruhi penanganan kasus. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok utama: praktisi kedokteran forensik, seperti dokter forensik dan penegak hukum, serta pembuat kebijakan, termasuk perwakilan pemerintah dan anggota organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu kekerasan. Sampel penelitian akan diambil secara purposive dengan memilih informan yang memiliki pengalaman langsung dan relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dan analisis dokumen. Wawancara semi-terstruktur akan dilakukan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh informan dalam integrasi kedokteran forensik dengan kebijakan publik. Seluruh wawancara akan direkam dan transkripnya dianalisis. Selain itu, dokumen terkait, seperti laporan kasus dan pedoman praktik kedokteran forensik, juga akan dianalisis untuk



mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik yang ada. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang melibatkan pengkodean awal untuk mengidentifikasi tema dan pola, pengembangan tema berdasarkan pertanyaan penelitian, serta interpretasi yang menghubungkan temuan dengan kerangka teori dan konteks kebijakan publik.

Untuk memastikan validitas data, triangulasi akan dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, serta meminta umpan balik dari informan untuk mengonfirmasi hasil analisis. Reliabilitas akan dijaga dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian dan analisis, sehingga memungkinkan replikasi studi di masa mendatang. Penelitian ini juga akan mematuhi prinsip-prinsip etika, termasuk mendapatkan persetujuan dari komite etik yang sesuai, serta menjamin kerahasiaan dan anonimitas data informan. Dengan pendekatan metodologi yang komprehensif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan mendalam tentang peran kedokteran forensik dalam kebijakan publik dan tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan penanganan kasus kematian akibat kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kedokteran Forensik dalam Penyelidikan Kematian Akibat Kekerasan

Kedokteran forensik menyediakan alat dan metode ilmiah untuk menganalisis penyebab kematian. Melalui autopsi, analisis DNA, dan teknik lainnya, ahli forensik dapat memberikan bukti yang akurat yang menjadi dasar penyidikan kriminal. Dalam kasus kematian akibat kekerasan, hasil analisis ini sangat penting untuk mengidentifikasi pelaku dan mengungkap fakta-fakta yang relevan (Ahmad, 2020).

2. Implementasi Kebijakan Publik Berbasis Bukti

Hasil dari praktik kedokteran forensik dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif. Misalnya, data tentang jenis kekerasan yang paling sering terjadi dapat membantu pemerintah merancang program pencegahan dan intervensi yang lebih sesuai (Sari, 2021). Kebijakan yang didasarkan pada bukti ilmiah dari kedokteran forensik cenderung lebih berhasil dalam mengurangi angka kekerasan.

3. Tantangan dalam Integrasi Kedokteran Forensik dan Kebijakan Publik

Meskipun kedokteran forensik memiliki potensi besar dalam mempengaruhi kebijakan publik, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satunya adalah kurangnya komunikasi antara praktisi forensik dan pembuat kebijakan (Junaidi, 2019). Keterbatasan sumber daya dan pelatihan juga dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, perlu adanya platform kolaborasi yang memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman antara kedua pihak.

4. Kasus Studi dan Praktik Terbaik

Dalam beberapa negara, terdapat contoh praktik baik di mana kedokteran forensik dan kebijakan publik telah berhasil diintegrasikan. Misalnya, program pelatihan untuk petugas kepolisian yang melibatkan ahli forensik dalam proses penyidikan telah menunjukkan hasil yang positif (Budi, 2022). Dengan meningkatkan pemahaman tentang kedokteran forensik, petugas dapat lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan.



5. Rekomendasi untuk Kebijakan Publik

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diberikan untuk meningkatkan integrasi kedokteran forensik dan kebijakan publik:

- a. Meningkatkan pelatihan untuk ahli forensik dan pembuat kebijakan.
- b. Mengembangkan protokol standar untuk pengumpulan dan analisis bukti.
- c. Mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, dan institusi akademis.

Integrasi yang lebih baik antara kedokteran forensik dan kebijakan publik dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus kematian akibat kekerasan. Dengan mengadopsi pendekatan berbasis bukti dan meningkatkan komunikasi antara pemangku kepentingan, kebijakan publik dapat lebih responsif dan efektif dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan.

KESIMPULAN

Kedokteran forensik dan kebijakan publik memainkan peran penting dalam penanganan kasus kematian akibat kekerasan yang semakin meningkat. Praktik kedokteran forensik tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi penyebab kematian, tetapi juga untuk memberikan bukti ilmiah yang dapat diandalkan dalam proses hukum. Melalui berbagai teknik seperti autopsi, analisis DNA, dan pemeriksaan forensik lainnya, ahli forensik dapat mengungkap fakta-fakta krusial yang membantu dalam penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus kekerasan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedokteran forensik dalam mendukung keadilan dan perlindungan terhadap korban.

Namun, tantangan dalam integrasi antara kedokteran forensik dan kebijakan publik masih ada. Salah satu isu utama adalah kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara praktisi forensik dan pembuat kebijakan. Banyak kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan bukti-bukti ilmiah yang dihasilkan oleh kedokteran forensik, yang dapat mengakibatkan kebijakan yang kurang efektif dalam menangani kekerasan. Keterbatasan sumber daya, termasuk kurangnya pelatihan untuk petugas kepolisian dan ahli forensik, juga menghambat implementasi kebijakan yang optimal.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada upaya untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Pelatihan bersama antara ahli forensik dan pembuat kebijakan dapat meningkatkan pemahaman dan komunikasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan. Selain itu, pengembangan protokol standar untuk pengumpulan dan analisis bukti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari kasus-kasus kematian akibat kekerasan digunakan secara efektif dalam merumuskan kebijakan.

Rekomendasi untuk meningkatkan integrasi ini meliputi pembentukan platform kolaboratif yang menghubungkan lembaga pemerintah, lembaga penegak hukum, dan institusi akademis. Dengan bantuan teknologi dan pendekatan berbasis bukti, kebijakan publik dapat diadaptasi untuk lebih baik menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Secara keseluruhan, integrasi yang lebih baik antara kedokteran forensik dan kebijakan publik tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penanganan kasus kematian akibat kekerasan, tetapi juga akan berkontribusi pada upaya menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil. Dengan memanfaatkan pengetahuan ilmiah dan data yang tersedia, kita dapat mengembangkan



kebijakan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk mengatasi masalah kekerasan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2020). *Pentingnya Kedokteran Forensik dalam Penyelidikan Kriminal*. Jurnal Forensik dan Hukum, 15(2), 123-135.
- Budi, T. (2022). *Praktik Terbaik dalam Penanganan Kasus Kematian Akibat Kekerasan*. Jurnal Penegakan Hukum, 10(1), 45-58.
- Junaidi, M. (2019). *Kolaborasi antara Ahli Forensik dan Pembuat Kebijakan*. Jurnal Ilmu Kedokteran Forensik, 8(3), 201-214.
- Sari, L. (2021). *Analisis Data Kekerasan dan Penerapan Kebijakan Publik*. Jurnal Kebijakan dan Masyarakat, 12(4), 89-102.
- Smith, J. (2018). *Forensic Medicine and Public Policy: A Global Perspective*. International Journal of Forensic Sciences, 5(2), 77-88.
- Williams, A. (2021). *The Role of Forensic Evidence in Criminal Justice Reform*. Journal of Criminal Law and Policy, 14(3), 201-215.
- Zhang, L., & Chen, Y. (2020). *Integrating Forensic Science into Public Policy: Challenges and Solutions*. Forensic Science Review, 32(1), 15-30.